



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	2
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1	Tujuan Evaluasi Renja	4
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	4
BAB III	RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	9
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022	9
BAB IV	PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan top down/bottom up.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renja SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang serta memberikan fasilitas suatu program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Langkat merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja tahun 2022 BPKAD Kabupaten Langkat adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Langkat.

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 5 (lima) Bupati Kabupaten Langkat.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kabupaten Langkat adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. TUJUAN EVALUASI

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN 2022

2.1. Tujuan Evaluasi Renja

Tujuan dilakukannya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 antara lain untuk :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan.
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang ditetapkan.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan.
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

Sampai dengan Triwulan II ini, hasil Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk BPKAD adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Kode Indikator	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (ukuran % kegiatan) (urutan 1)	Target Kinerja Peringkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah)	6.		7.		8.		9. Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Peringkat Daerah yang dianggarkan (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Peringkat Daerah yang dianggarkan (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya Peringkat Daerah Tahun 2024 (Tahun ke-1) yang dianggarkan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Peringkat Daerah 2024 (akhir tahun 2024) (%)	Unit Peringkat Daerah Peringkat Peringkat Daerah		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	1	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			
		5 02 03 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten	5	570.279.688	1	141.315.187	1 Tahun	54.362.138	-	0	-	-	-	-	54.362.138	9,52				
		5 02 03 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Akreditasi dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus	340	409.496.823.011	1	338.422.209.100	1 Tahun	339.632.268.500	0,25	24.094.618.500	0,3	24.094.618.500	25,00	0,3	419.317.417.400	101,03				
		5 02 03 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Memadai	Jumlah Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	3	10.041.615.453	1	8.298.855.246	1 Tahun	11.128.241.320	0,25	494.500.000	0,25	1.521.449.200	50,00	0,5	15.144.560.520	130,90				
		5 02 03 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	340	5.572.344.301	1	4.605.077.935	1 Tahun	4.656.577.935	-	-	0	-	-	0	4.656.577.935	83,57				
		5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
		5 02 03 2.04	Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
		5 02 03 2.04 01	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya dokumen standar satuan harga	3	-	1	222.637.014	1 Dekumen	225.194.527	0,25	8.000.000	0,25	8.000.000	50,00	0,5	241.794.527	#DIV/0!				
		5 02 03 2.04 02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengisian aset Pemda dan terlaksananya pembelian sertifikat tanah milik Pemda, pelayanan dan penghapusan BMD	5	335.474.750	1	305.449.178	1 Tahun	337.058.390	0,3	115.806.972	0,25	24.420.000	50,00	0,5	475.395.362	141,21				
		5 02 03 2.04 03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemutakhiran data aset dan sensus BMD	5	106.796.800	1	98.855.570	1 tahun	98.271.055	-	-	0	-	-	0	98.271.055	73,34				
		5 02 03 2.04 11	Rekonstruksi dalam rangka Penyelenggaraan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan BMD	5	764.593.241	1	246.377.420	1 tahun	246.182.175	0,25	43.200.000	0,25	30.000.000	50,00	0,5	395.363.175	41,77				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi kinerja																						
Faktor pendukung keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Trend lanjut yang diperlukan dalam mewujudkan kinerja*):																						
Trend lanjut yang diperlukan dalam Rangka Peringkat Daerah Kabupaten Berkinerja*):																						

*1 Data dari Kepala Bappeda

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama semester I dan dengan mempertimbangkan adanya situasi luar biasa adanya pandemi Covid 19 maka dilakukan beberapa perubahan dalam anggaran TA 2022 dengan rincian seperti pada tabel perubahan yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI : BPKAD KABUPATEN LANGKAT

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
					Target 2022		Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				375.019.703.272	378.106.073.825	
5	02		KEUANGAN				375.019.703.272	378.106.073.825	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100%	100%		12.965.201.107	16.809.742.445	
5	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		7.534.099.881	7.650.240.781	
5	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		6.402.529.782	6.402.529.782	
5	02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan		511.540.682	555.100.682	
5	02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54 OPD	54 OPD		426.774.825	499.355.725	
5	02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	54 OPD	54 OPD		193.254.592	193.254.592	
5	02	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		1.736.457.268	1.410.664.268	
5	02	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	90 stel	90 stel		102.920.000	102.920.000	
5	02	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35 Orang	40 Orang		368.980.000	418.980.000	
5	02	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	54 OPD	54 OPD		247.914.916	247.914.916	
5	02	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	54 OPD	54 OPD		1.016.642.352	640.849.352	
5	02	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		1.264.486.085	1.731.534.585	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lapaaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas	
						Target 2022		Pagu Indikatif			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang digunakan	8 Jenis	8 Jenis	10.357.253	10.357.253	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dipergunakan	32 Jenis	32 Jenis	143.576.559	143.576.559	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah barang terpakai	26 Jenis	26 Jenis	49.573.897	49.573.897	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	36.300.000	36.300.000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang yang di cetak	20 Jenis	20 Jenis	212.110.000	212.110.000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	92.568.376	109.616.876	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	720.000.000	1.170.000.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	465.242.477	3.962.950.415	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	1 unit	14 unit	35.000.000	3.385.540.000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kerja, kursi, lemari	42 unit	44 unit	121.557.350	176.847.350	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan AC, komputer, printer,kalkulator dan laptop	29 unit	37 unit	230.270.880	322.148.818	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	16 unit	16 unit	78.414.247	78.414.247	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	804.335.396	804.335.396	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	12 Bulan	297.879.996	297.879.996	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa yang dibayarkan kepada pegawai non PNS	481 OB	481 OB	506.455.400	506.455.400	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.160.580.000	1.250.017.000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terawatnya Kendaraan dinas roda dua dan roda empat	23 Unit	23 Unit	799.600.000	717.060.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
					Target 2022		Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	02	01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65 Unit	65 Unit	60.980.000	63.555.000	
5	02	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	300.000.000	469.402.000	
5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	361.167.696.078	360.385.780.793	
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			4.037.847.552	3.387.747.552	
5	02	02	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300 buku	300 buku	247.472.719	247.472.719	
5	02	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	300 buku	300 buku	245.625.800	245.625.800	
5	02	02	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	54 Dkumen	54 Dkumen	131.308.145	13.108.145	
5	02	02	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	606.366.050	74.466.050	
5	02	02	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	54 Dokumen	54 Dokumen	265.323.653	265.323.653	
5	02	02	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	645.173.080	645.173.080	
5	02	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	350 Buku	350 Buku	940.509.645	940.509.645	
5	02	02	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	500 Buku	500 Buku	956.068.460	956.068.460	
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	1.122.947.876	1.836.934.366	
5	02	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Buku	12 Buku	90.386.480	184.086.480	
5	02	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	54 OPD	54 OPD	38.037.690	50.037.690	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
						Target 2022		Pagu Indikatif		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	02	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	10 Laporan	10 Laporan	159.947.771	203.347.771	
5	02	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak	2 Dokumen	2 Dokumen	160.016.875	233.956.875	
5	02	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya laporan data penerimaan dan pengeluaran kas	54 OPD	54 OPD	202.249.500	293.866.250	
5	02	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota	Terciptanya sumber daya manusia yang mengerti tentang sistem dan prosedur keuangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	472.309.560	871.639.300	
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	100%	588.812.895	516.231.995	
5	02	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Perbup dan Perda	600 Buku	600 Buku	383.796.780	348.155.880	
5	02	02	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah	Tersedianya Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.653.977	150.653.977	
5	02	02	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan Belanja SKPD dan Kabupaten	200 Buku	200 Buku	54.362.138	17.422.138	
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	355.418.087.755	354.644.866.880	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Laporan Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
						Target 2022		Pagu Indikatif		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	240 Desa	240 Desa	339.632.768.500	339.632.768.500	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Kegiatan	3 Kegiatan	11.128.741.320	10.355.520.445	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	240 Desa	240 Desa	4.656.577.935	4.656.577.935	
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	886.806.087	910.550.587	
5	02	03	2.01		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	886.806.087	910.550.587	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	225.194.527	187.189.027	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	200 Sertifikat	200 Sertifikat	337.158.390	377.158.390	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	78.271.055	78.271.055	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	54 OPD	54 OPD	246.182.115	267.932.115	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional. Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaikan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Rencana lanjutan

Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2019 sampai 2024.

Pengusulan Perubahan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2022 sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tahun 2022 dan Perubahan Anggaran pada perencanaan tahun 2022 ini sebesar Rp 81.204.820.959,-.

Untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakelola yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.